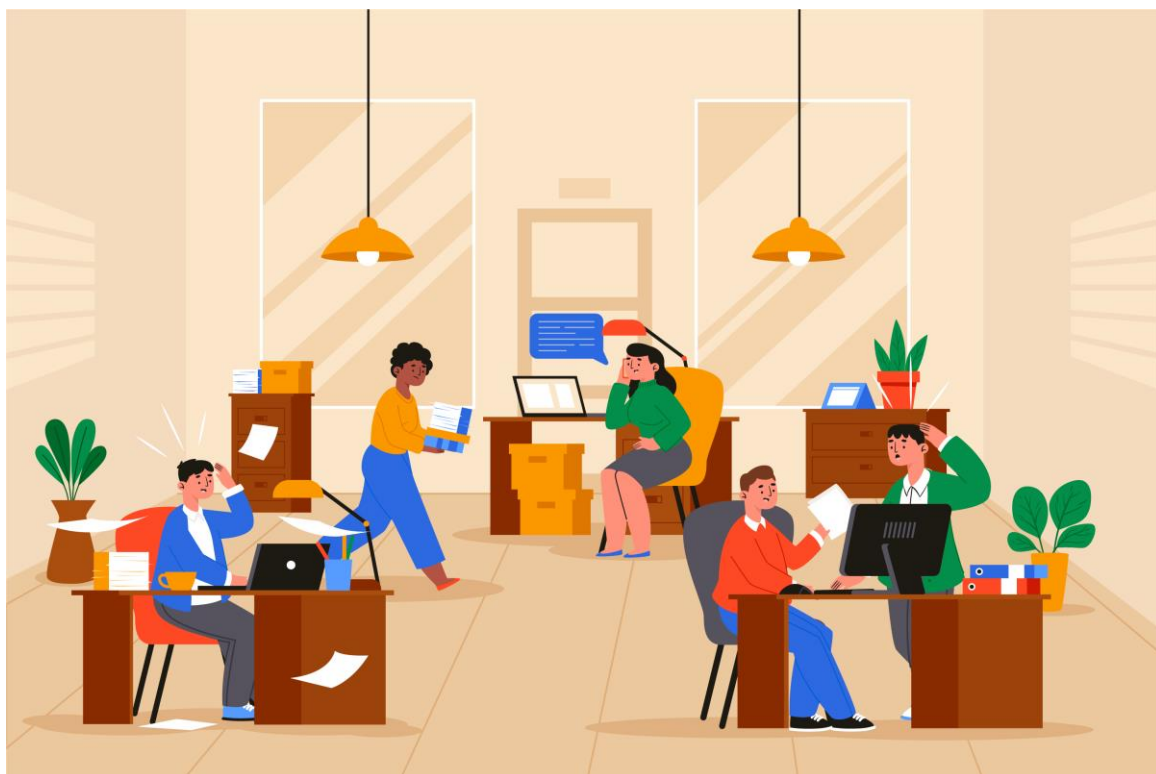




RANCANGAN
RENCANA KERJA P-APBD DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja P-APBD Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026.

Rencana Kerja P-APBD ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja P-APBD ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan Pembangunan Bidang Sosial sebagai tahapan kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi Dinas Sosial yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”***.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Perubahan Rencana Kerja P-APBD Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Mojokerto, Mei 2026

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto



Try Raharjo Murdianto, S.STP., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP. 19870519 200602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Landasan Hukum.....2

1.3. Maksud dan Tujuan.....8

1.4. Sistematika Penulisan.....9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.....10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....10

2.2. Review Terhadap Rancangan P-RKPD.....37

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....57

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH59

BAB IV PENUTUP.....70

4.1. Catatan Penting.....70

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....70

4.3. Rencana Tindak Lanjut.....70

Lampiran- lampiran.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja P-APBD Dinas Sosial Tahun 2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan diatas secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) untuk periode tahunan serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja P-APBD Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 berfokus pada Prioritas Agenda Pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, sebagaimana terdokumentasi dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026-2029, yaitu : ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”***. Perubahan Rencana Kerja P-APBD Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 mengacu kepada Misi Bupati yang ke – 3 (tiga) yaitu : ***“Membangun kemandirian ekonomi bagi industri pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat”***.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 juga mengacu kepada Rencana Kerja Kementerian Sosial Tahun 2026 dengan Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap masyarakat rentan dalam dampak pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 Merupakan visi, misi, dan program prioritas (platform) serta arah kebijakan Gubernur Jawa Timur yang bertumpu pada Visi Gubernur Jawa Timur Tahun 2025-2030 yaitu ***“Jatim maju yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045”***.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan Tahun 2026 serta untuk mendukung perwujudan Misi Dinas Sosial, maka ditetapkan **sasaran** yaitu :

“Meningkatnya PPKS yang mandiri” dengan indikator sasaran **“Persentase PPKS yang mandiri”**.

Dan menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan penyusunan P-APBD.

Sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan Perangkat Daerah, rencana kerja juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan kondisi dan situasi. Artinya rencana kerja bisa mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja ini menfokuskan pada perubahan pada Tahun 2026 dikarenakan adanya pergantian Kepala Daerah. Perubahan Rencana Kerja memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran pagu indikatif yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Sedangkan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja P-APBD Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal pembentukan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

- tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007

- tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 22. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025;
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 25. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektotorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1).

43. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
44. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Srtategik (RENSTRA) Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja P-APBD Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagai berikut :

Maksud

Perubahan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan yang bersifat tahunan yang telah disusun pada Tahun 2026.

- a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun sasaran dengan adanya perubahan Kepala Daerah Baru;
- b. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan sub. kegiatan pada tahun berjalan dengan adanya perubahan nomenklatur baru;
- c. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan pada tahun berjalan;
- d. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun berjalan;
- e. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan pada tahun berjalan.

Tujuan

Perubahan Rencana Kerja ini bertujuan untuk :

- a. Mengantisipasi perubahan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan
- b. Menjadi acuan bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja P-APBD Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 ini sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan rencana kerja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

RPJMD		Renstra	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Menurunkan angka kemiskinan	Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga Miskin dan Rentan	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Meningkatnya PPKS yang mandiri

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai kinerja lainnya yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,57 (Nilai)

Dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung oleh 6 (enam) program 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh) sub kegiatan.

Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 5 (lima) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan;
2. Program Pemberdayaan Sosial, dengan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan;

3. Program Rehabilitasi Sosial, dengan 2 (dua) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan;
5. Program Penanganan Bencana, dengan 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan Tahun 2026 (Triwulan I), yang terdiri dari 6 program 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan hasil capaian realisasi anggaran sebesar 7,46%, dan capaian kinerja sebesar 25%.

Capaian Renstra Dinas Sosial pada Tahun 2026 pada umumnya tercapai, adapun capaian program dan kegiatan Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I berdasarkan realisasi kinerja dan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1 : ***“Meningkatnya PPKS yang mandiri”*** dengan indikator kinerja ***Persentase PPKS yang mandiri***, Tahun 2026 target sasaran 0,067.

Perhitungan rata-rata capaian diperoleh dari formulasi PPKS yang meningkat mandiri dibagi Jumlah PPKS kali 100%.

Sedangkan untuk anggaran yang mendukung indikator kinerja utama sebesar Rp. 6.927.654.599,00 dan terserap sebesar Rp. 106.442.536,00 atau 1,54%.

2. Kinerja lainnya yaitu 1 : ***“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah”*** dengan indikator kinerja ***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***, target Tahun 2026 sebesar 82,57 (A).

Sedangkan untuk anggaran yang mendukung indikator kinerja lainnya sebesar Rp. 5.815.082.676,00 dan terserap sebesar Rp. 843.554.829,00 atau 14,51%.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- a. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan**, target Tahun 2026 sebesar 90%.
- b. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**, target Tahun 2026 sebesar 96,15%.

Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Kinerja PD yang tercapai minimal 90%, anggaran terealisasi 0% dan capaian kinerja 25% dari target 90%.

Sub. Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 33,33%.

Dari target 9 dokumen, terealisasi 3 dokumen.

- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 30%.

Dari target 10 laporan, terealisasi 3 laporan.

Kegiatan :

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase hasil temuan pemeriksaan laporan keuangan yang ditindaklanjuti, anggaran terealisasi 7,46% dan capaian kinerja 25%, dari target 96,15%.

Sub. Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran terealisasi 7,46% dengan capaian kinerja 25%.

Dari target 12 bulan, terealisasi 3 bulan.

Kegiatan :

- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai standar, anggaran terealisasi 20,88% dan capaian kinerja 25%, dari target 90%.

Sub. Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, anggaran terealisasi 16,07% dengan capaian kinerja 25%.

Dari target 12 bulan, terealisasi 3 bulan.

- b. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, anggaran terealisasi 23,49% dengan capaian kinerja 25%.

Dari target 12 bulan, terealisasi 3 bulan.

Kegiatan :

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan yang **pertama** :

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar, anggaran terealisasi 0% dan capaian kinerja 25%, dari target 90%.

Sub. Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%.

Dari target 12 bulan, terealisasi 3 bulan.

Indikator kinerja kegiatan yang **kedua** :

Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai standar, anggaran terealisasi 1,07% dan capaian kinerja 25%, dari target 90%.

Sub. Kegiatan :

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%.

Dari target 12 bulan, terealisasi 3 bulan.

c. Penyediaan Bahan/Material

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material adalah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%.

Dari target 12 bulan, terealisasi 3 bulan.

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, anggaran terealisasi 11,70% dengan capaian kinerja 25%.

Dari target 12 bulan, terealisasi 3 bulan.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran terealisasi 1,21% dengan capaian kinerja 25%.

Dari target 12 laporan, terealisasi 3 laporan.

Kegiatan :

- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar, anggaran terealisasi 3,28% dan capaian kinerja 25%, dari target 90%.

Sub. Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, anggaran terealisasi 11,29% dengan capaian kinerja 33,33%.

Dari target 12 unit, terealisasi 4 unit.

- b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%.

Dari target 5 unit, terealisasi 0 unit.

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 37,50%.

Dari target 8 unit, terealisasi 3 unit.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut digunakan untuk mendukung kinerja lainnya pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan.

Dengan anggaran Rp. 5.815.082.676,00 dan terserap sebesar Rp. 843.554.829,00 atau 14,51% dengan capaian kinerja 25%.

2. Program Pemberdayaan Sosial

Pencapaian kinerja program pemberdayaan sosial adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif, dengan realisasi anggaran sebesar 0% dan capaian kinerja 25%, dari target 100%.

Kegiatan :

- 1) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat, anggaran terealisasi 0% dan capaian kinerja 25%, dari target 100%.

Sub. Kegiatan :

- a. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%;

Dari target 62 orang, terealisasi 0 orang.

- b. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%.

Dari target 47 lembaga, terealisasi 0 lembaga.

Pada Program Pemberdayaan Sosial tersebut digunakan untuk pemberdayaan/pembinaan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Lembaga yang terdiri dari Katar 304, LKS 47 (LKSA 41, LKSU 3, LKS ODGJ 1).

Dengan total anggaran Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 248.131.319,00 terserap Rp. 0,00 atau 0% dengan capaian kinerja 25%.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial adalah Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar, dengan anggaran tersealisasi 6,27% dan capaian kinerja 0,05%, dari target 0,21%.

Kegiatan:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial, anggaran terealisasi 7,19% dan capaian kinerja 0,04%, dari target 0,17%.

Sub. Kegiatan :

- a. Penyediaan Permakanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 13,46% dengan capaian kinerja 25%;

Dari target 307 orang (50 PW, 257 anak dalam LKSA), terealisasi 50 orang.

b. Penyediaan Sandang

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Sandang adalah Jumlah Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 0,31% dengan capaian kinerja 25%;

Dari target 50 orang, terealisasi 0 orang.

c. Penyediaan Alat Bantu

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 9% dengan capaian kinerja 25%;

Dari target 49 orang, terealisasi 0 orang.

d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%;

Dari target 15 orang, terealisasi 0 orang.

e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 2,04% dengan capaian kinerja 25%;

Dari target 50 orang, terealisasi 0 orang.

- f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat adalah Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%;

Dari target 10 orang, terealisasi 0 orang.

- g. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%;

Dari target 15 orang, terealisasi 0 orang.

- h. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 293,33%;

Dari target 15 orang, terealisasi 44 orang.

- i. Pemberian Layanan Kedaruratan

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%.

Dari target 20 orang, terealisasi 0 orang.

Kegiatan:

- 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi, anggaran terealisasi 0,01% dan capaian kinerja 25%, dari target 0,04%.

Sub. Kegiatan :

- a. Penyediaan Permakanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%. Dari target 205 orang, terealisasi 0 orang;

- b. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak adalah Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%;

Dari target 15 orang, terealisasi 0 orang.

Pada Program Rehabilitasi Sosial tersebut digunakan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Rehabilitasi Sosial ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Yang

mana pada kegiatan pertama ada 9 (sembilan) sub kegiatan sedangkan pada kegiatan kedua ada 2 (dua) sub kegiatan.

Dengan total anggaran Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 1.569.481.100,00 terserap Rp. 98.445.650,00 atau 6,27% dengan capaian kinerja 25%.

Sedangkan anggaran yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 1.369.879.950,00.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pencapaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang **pertama** adalah :

Persentase Desa yang updating SIKS-NG, dengan anggaran terealisasi 2,27% dan capaian kinerja 25%, dari target 90%.

Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan yang pertama ini adalah Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar, anggaran terealisasi 3,24% dan capaian kinerja 1%, dari target 5%.

Sub. Kegiatan :

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan, anggaran terealisasi 3,24% dengan capaian kinerja 1%.

Dari target 304 desa, terealisasi 0 desa.

Kegiatan :

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan yang **kedua** ini adalah Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha, anggaran terealisasi 0% dan capaian kinerja 0,05%, dari target 0,20%.

Sub. Kegiatan :

b. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%.

Dari target 20 orang, terealisasi 0 orang.

Pencapaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang **kedua** adalah :

Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha, dengan anggaran terealisasi 0,09% dan capaian kinerja 3,01%, dari target 12,05%.

Kegiatan :

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan yang ketiga ini adalah Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri, anggaran terealisasi 0,09% dan capaian kinerja 0,002%, dari target 0,24%.

Sub. Kegiatan :

c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pencapaian indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 0,09% dengan capaian kinerja 25%;

Dari target 7.430 PM, terealisasi 0 PM.

Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut digunakan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Tujuan DBHCHT adalah: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mendukung kesehatan,

Pengembangan ekonomi, Pengawasan produksi dan peredaran tembakau. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Dengan total anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 4.971.900.580,00 terserap Rp. 7.996.886,00 atau 0,16% dengan capaian kinerja 25%.

Anggaran Rp. 4.971.900.580,- tersebut digunakan untuk :

DBHCHT	: Rp. 2.899.156.300,-
PKH	: Rp. 185.500.000,-
Pengelolaan Data Fakir miskin	: Rp. 86.889.380,-
PKH Banmas	: Rp. 47.835.000,-
Sekolah Rakyat	: Rp. 1.712.821.000,-

5. Program Penanganan Bencana

Pencapaian kinerja Program Penanganan Bencana yang **pertama** adalah Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat, dengan anggaran terealisasi 0% dan capaian kinerja 25%, dari target 100%.

Kegiatan :

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar, anggaran terealisasi 0% dan capaian kinerja 25%, dari target 100%.

Sub. Kegiatan :

- a. Penyediaan Makanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Makanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%;
Dari target 1.000 orang, terealisasi 1.351 orang.

- b. Penyediaan Sandang

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Sandang adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan

Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%;

Dari target 1.000 orang, terealisasi 1.351 orang.

c. Pelayanan Dukungan Psikososial

Indikator kinerja sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial adalah Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%.

Dari target 1.000 orang, terealisasi 1.351 orang.

Pencapaian kinerja Program Penanganan Bencana yang **kedua** adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif, dengan anggaran terealisasi 0% dan capaian kinerja 25%, dari target 100%.

Kegiatan :

2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat, anggaran terealisasi 0% dan capaian kinerja 25%.

Sub. Kegiatan :

a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana adalah Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%.

Dari target 46 orang, terealisasi 0 orang.

Pada Program Penanganan Bencana tersebut digunakan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Penanganan Bencana ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan kegiatan Penyelenggaraan

Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Tujuan dari Program Penanganan Bencana adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, mengurangi resiko bencana, dan meminimalkan dampak bencana. Yang mana pada pada program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Kegiatan pertama ada 3 (tiga) sub kegiatan sedangkan pada kegiatan kedua ada 1 (satu) sub kegiatan.

Dengan total anggaran Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 123.141.600,00 terserap Rp. 0,00 atau 92,65% dengan capaian kinerja 25%.

Sedangkan anggaran yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 110.000.000,00.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pencapaian kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik, dengan anggaran terealisasi 0% dan capaian kinerja 25%, dari target 100%.

Kegiatan :

- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase Makam yang terpenuhi pemeliharaannya, anggaran terealisasi 0% dan capaian kinerja 25%, dari target 100%.

Sub. Kegiatan :

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota adalah Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 25%.

Dari target 6 makam, terealisasi 0 makam.

Pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan tersebut bertujuan untuk memelihara Taman Makam Pahlawan. Pada program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Dengan total anggaran Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp. 15.000.000,00 terserap Rp. 0,00 dengan capaian kinerja 25%.

Total anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 12.742.737.275,00 terealisasi sebesar Rp. 949.997.365,00 atau 7,46% dengan capaian kinerja 25%.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan Triwulan I sebagaimana tersebut Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
LAPORAN EVALUASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

N O	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKT U PELAKS A NAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISA SI	CAPAIA N (%)	TARGET	REALISA SI	CAPAIA N		ALOKASI	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,57	20,39	25,00	82,57	20,39	25,00	Maret				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								Maret	5.815.082.676	843.554.829	14,51	

		Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90%	0,23	25,56	90%	0,23	25,56					
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,15%	0,24	24,96	96,15%	0,24	24,96					
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai minimal 90%	90%	0,23	25,56	90%	0,23	25,56	Maret	17.024.200	0	0,00	
	1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	3	33,33	9 Dokumen	3	33,33		8.512.100	0	0,00	
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	3	30,00	10 Laporan	3	30,00		8.512.100	0	0,00	
	Administrasi Kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN	81,50	25,00	30,67	81,50	25,00	30,67					

	Perangkat Daerah												
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan laporan keuangan yang ditindaklanjuti	96,16%	0,25	26,00	96,16%	0,25	26,00	Maret	3.976.703.000	680.924.730	17,12	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	3	25,00	12	3	25,00		3.976.703.000	680.924.730	17,12	
			Orang/Bulan			Orang/Bulan							
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%	0,23	25,56	90%	0,23	25,56	Maret	100.000.000	0	0,00	
	1. Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12	3	0,00	12	3	25,00		100.000.000	0	0,00	
			Paket			Paket							

	Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan											
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai standar	90%	0,23	25,56	90%	0,23	25,56	Maret	286.273.726	3.065.000	1,07	
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3	25,00	12 Paket	3	25,00		44.110.930	-	0,00	
	3. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	3	25,00	12 Paket	3	25,00		162.162.796	-	0,00	
	4. Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Paket Barang Cetak dan	12 Paket	3	25,00	12 Paket	3	25,00		20.000.000	2.340.000	11,70	

		dan Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan										
	5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3	25,00	12 Laporan	3	25,00		60.000.000	725.000	1,21
	4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai standar	90%	0,23	25,56	90%	0,23	25,56	Maret	639.000.000	133.415.099	20,88
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3	25,00	12 Laporan	3	25,00		225.000.000	36.166.139	16,07
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3	25,00	12 Laporan	3	25,00		414.000.000	97.248.960	23,49
	5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Ketersediaan	90%	0,23	25,56	90%	0,23	25,56	Maret	796.081.750	26.150.000	3,28

	Urusan Pemerintah Daerah	Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar											
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	4	33,33	12 Unit	4	33,33		206.441.350	23.300.000	11,29	
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 Unit	0	0,00	5 Unit	0	0,00		510.591.350	-	0,00	
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	3	37,50	8 Unit	3	37,50		79.049.050	2.850.000	3,61	

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabil itasi											
	Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang mandiri	0,024%	0,000	0,00	0,024%	0,000	0,00	Maret	6.927.654.599	106.442.536	1,54	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100%	0	0,00	100%	0	0,00	Maret	248.131.319	0	0,00	
	1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	100%	0	0,00	100%	0	0,00	Maret	248.131.319	0	0,00	
	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya	47 Lembaga	0	0,00	47 Lembaga	0	0,00		53.620.959	0	0,00	LKS, pelaksanaan Juli (estimasi)

		Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/ Kota											
	2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	62 Orang	0	0,00	62 Orang	0	0,00		194.510.360	0	0,00	Pelaksanaan Juni (estimasi)
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								Maret	4.971.900.580	7.996.886	0,16		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Desa yang updating SIKS-NG	90%	0	0,00	90%	0	0,00	Maret	159.923.280	3.630.000	2,27	

1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar	5%	0	0,00	5%	0	0,00	Maret	112.088.280	3.630.000	3,24	
1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	304 Desa	0,00	0,00	304 Desa	0,00	0,00		112.088.280	3.630.000	3,24	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	0,20%	0	0,00	0,20%	0	0,00	Maret	47.835.000	-	0,00	
2.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	20 Orang	0	0,00	20 Orang	0	0,00		47.835.000	-	0,00	Pelaksanaan April-Mei (estimasi)

		Kewenangan Kabupaten / Kota											
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	12,05%	0	0,00	12,05%	0	0,00	Maret	4.811.977.300	4.366.886	0,09	
	1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri	0,024%	0	0,00	0,024%	0	0,00	Maret	4.811.977.300	4.366.886	0,09	
	3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	7.430 PM	0	0,00	7.430 PM	0	0,00		4.811.977.300	4.366.886	0,09	

		Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota											
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								Maret	123.141.600	-	0,00	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	100%	0	0,00	100%	0	0,00	Maret	110.000.000	-	0,00	
	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar	100%	0	0,00	100%	0	0,00	Maret	110.000.000	-	0,00	
	1. Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa	1.351 Orang	1.351	100,00	1.351 Orang	1.351	100,00		90.000.000	-	0,00	

		Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota											
	2. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	1.351 Orang	1.351	100,00	1.351 Orang	1.351	100,00		10.000.000	-	0,00	Pelaksanaan bln Okt
	3. Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	1.351 Orang	1.351	100,00	1.351 Orang	1.351	100,00		10.000.000	-	0,00	

		Kewenangan Kabupaten/ Kota											
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100%	0	0,00	100%	0	0,00	Maret	13.141.600	-	0,00	
	2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	100%	0	0,00	100%	0	0,00	Maret	13.141.600	-	0,00	
	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan	46 Orang	0	0,00	46 Orang	0	0,00		13.141.600	-	0,00	Pelaksanaan Juni/November (estimasi) Juni 20 Org

	Taruna Siaga Bencana	Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota											Nov 26 Org
5.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	0,21%	0	0,00	0,21%	0	0,00	Maret	1.569.481.100	98.445.650	6,27	
	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	0,17%	0	0,00	0,17%	0	0,00	Maret	1.369.879.950	98.445.650	7,19	
	1. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi	307 Orang	50	16,29	307 Orang	50	16,29		700.000.000	94.245.650	13,46	50 PW, 257 anak dalam LKSA Pelaksanaan di bln April

		Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota											
	2. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	0	0,00	50 Orang	0	0,00		196.346.600	600.000	0,31	Mulai Juli
	3. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	49 Orang	0	0,00	49 Orang	0	0,00		196.152.400	-	0,00	Pelaksanaan di bln April
	4. Pemberian Pelayanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	15	0	0,00	15	0	0,00		15.000.000	-	0,00	

		Reunifikasi Keluarga	Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			Orang							
	5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	0	0,00	50 Orang	0	0,00		176.444.800	3.600.000	2,04	Mulai Januari
	6.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10 Orang	0	0,00	10 Orang	0	0,00		4.030.300	-	0,00	TW III

		Kewenangan Kabupaten/Kota											
7.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	0	0,00	15 Orang	0	0,00		4.402.600	-	0,00	
8.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	44	293,33	15 Orang	44	293,33		11.255.000	-	0,00	
9.	Pemberian Layanan Kedaruratan Pengendalian	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	20 Orang	0	0,00	20 Orang	0	0,00		66.248.250	-	0,00	

	Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Kewenangan Kabupaten/Kota											
2.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	0,04%	0	0,00	0,04%	0	0,00	Maret	199.601.150	-	0,00	
1.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	205 Orang	0	0,00	205 Orang	0	0,00		195.296.900	-	0,00	Permakanan kusta di bln Maret

		Kewenangan Kabupaten/Kota												
	2.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	0	0,00	15 Orang	0	0,00		4.304.250	-	0,00	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang	100%	0	0,00	100%	0	0,00	Maret	15.000.000	-	0,00	

		terkelola dengan baik											
	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Persentase Makam yang terpenuhi pemeliharaannya	100%	0	0,00	100%	0	0,00	Maret	15.000.000	-	0,00	
	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	6 Makam	0	0,00	6 Makam	0	0,00		15.000.000	-	0,00	
TOTAL										12.742.737.275	949.997.365	7,46	

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sampai dengan Tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

Tabel TC.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN
PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL S/D TAHUN 2026
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama PD : DINAS SOSIAL

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output) Sub. Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub. Kegiatan s/d tahun (n.3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program /Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun Lalu (n.2)			Target Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan (Renja OPD Tahun n.1) Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2026)	
								Target Renja OPD Tahun (n.2) Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun (n.2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n.1) Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)
				Urusan Sosial Bidang Urusan Sosial									
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,57	80,48	80,50	80,98	100,60%	82,57	82,57	100%

06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Keseekretariatan	90%	-	-	-	-	90%	90%	100%
					Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,15	90	90	95,53	106,14%	96,15	96,15	100%
06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai minimal 90%	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	100%

06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	81,50	65	64,24	78,01	98.83%	81,50	81,50	100%
06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan laporan keuangan yang ditindaklanjuti	96,15%	80%	90%	95,53%	106,14%	96,15%	96,15%	100%
06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	14 Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	100%	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	100%
06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%	85%	87%	87%	100%	90%	90%	100%
06	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai standar	90%	85%	87%	87%	100%	90%	90%	100%
06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%

06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	12 Paket	0	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai standar	90%	85%	87%	87%	100%	90%	90%	100%
06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%	85%	85%	85%	100%	90%	90%	100%
06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos)	12 Bulan	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	13 Unit	100%
06	01	2.09	0003	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	8 Unit	12 Bulan	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%

				Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang mandiri	0,067%							
06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100%	80%	75%	75%	100%	100%	100%	100%
06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	100%	60 PSM, 18 TKSK, 15 KUBE, 8 LKSA dan 180 Orang pengurus LKSA, 322 Orang pengurus Katar, 50 Oang klien PW	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	100%	100%	100%	100%
06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	62 Orang	60 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	62 Orang	62 Orang	100%

06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	47 Lembaga	8 LKSA dan 180 Orang pengurus LKSA, 322 Orang pengurus Katar, 50 Oang klien PW	41 Lembaga (LKS), 19 Pengurus Katar (Kec+Kab), 8 UEP Katar (Desa)	41 Lembaga (LKS), 19 Pengurus Katar (Kec+Kab), 8 UEP Katar (Desa)	100%	47 Lembaga	47 Lembaga	100%
06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	0,21%	60%	55%	55%	100%	0,21%	0,21%	100%
06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	0,17%	18 Disabilitas, 9 Gepeng, 12 Bulan	181 Orang, 25 Orang, 50 Orang	181 Orang, 25 Orang, 50 Orang	100%	0,17%	0,17%	100%
06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	307 Orang	0	181 Orang	181 Orang	100%	307 Orang	307 Orang	100%

06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	0	0	0	0%	50 Orang	50 Orang	100%
06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	49 Orang	18 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	49 Orang	49 Orang	100%
06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	0	0	0	0%	15 Orang	15 Orang	100%
06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	0	0	0	0%	50 Orang	50 Orang	100%

06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten / Kota	10 Orang	9 Orang Gepeng	0	0	0%	10 Orang	10 Orang	100%
06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten / Kota	15 Orang	0	0	0	0%	15 Orang	15 Orang	100%
06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kabupaten/Kota	15 Orang	0	0	0	0%	15 Orang	15 Orang	0%
06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kabupaten/Kota	20 Orang	0	50 Orang	50 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100%

06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	0,04%	186 KK, 20 Orang PSK, 150 Peserta adopsi, 1 kali razia, 150 Peserta ABH	50 Orang, 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang	50 Orang, 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang	100%	0,04%	0,04%	100%
06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	205 Orang	186 KK	50 Orang	50 Orang	100%	205 Orang	205 Orang	100%
06	04	2.01	0007	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	0	0	0	0%	15 Orang	15 Orang	100%

06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	90%	60%	60%	60%	100%	90%	90%	100%
06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar	5%	19 Orang, 114 Orang, 304 Desa, 18 Kecamatan, '78.930 Keluarga	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM	100%	5%	5%	100%
06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	304 Desa	304 Desa 18 Kecamatan	324.480 Keluarga	324.480 Keluarga	100%	304 Desa	304 Desa	100%
06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	0,20%	19 Orang, 114 Orang, 304 Desa, 18 Kecamatan, '78.930 Keluarga	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM	100%	0,20%	0,20%	100%
06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang	0	38.044 KPM	38.044 KPM	100%	20 Orang	20 Orang	100%

06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	12,05%	60%	60%	60%	100%	12,05%	12,05%	100%
06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri	0,024%	19 Orang, 114 Orang, 304 Desa, 18 Kecamatan, '78.930 Keluarga	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM	100%	0,024%	0,024%	100%
06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	7.430 Keluarga	78.930 Keluarga	78.930 Keluarga	78.930 Keluarga	100%	7.430 Keluarga	7.430 Keluarga	100%
06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	100%	60%	60%	60%	100%	100%	100%	100%

06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar	100%	12 Bulan, 12 Bulan	371 Orang	371 Orang	100%	100%	100%	100%
06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	1.000 Orang	12 Bulan	371 Orang	371 Orang	100%	1.000 Orang	1.000 Orang	100%
06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	1.000 Orang	0	0	0	0%	1.000 Orang	1.000 Orang	100%
06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.000 Orang	0	0	0	0%	1.000 Orang	1.000 Orang	100%

06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100%	60%	60%	60%	100%	100%	100%	100%
06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	46 Orang	44 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	46 Orang	46 Orang	100%
06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	46 Orang	44 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	46 Orang	46 Orang	100%
06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

06	07	2.01		Pemeiliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Persentase Makam yang terpenuhi pemeliharaannya	100%	0	6 Makam	6 Makam	100%	100%	100%	100%
06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6 Makam	0	6 Makam	6 Makam	100%	6 Makam	6 Makam	100%

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) kinerja lainnya dalam dokumen perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK).

Adapun faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dari sasaran strategis Dinas Sosial beserta tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

Faktor Keberhasilan :

1. Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan KAK;
2. Pelaksanaan anggaran sudah sesuai anggaran kas;
3. Keterlibatan ASN Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Pilar-pilar Sosial, dan Instansi terkait
4. Adanya keterlibatan ASN Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan.

Faktor Kegagalan :

1. Adanya kenaikan harga pokok;
2. Adanya penambahan anggaran untuk Sub. Kegiatan yang mana di APBD Tahun 2026 tidak teranggarkan;
3. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang penambahan (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) DBHCHT, sesuai dengan Data Proyeksi DBHCHT.

Tindak lanjut :

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 (P-APBD);
2. Usulan penambahan anggaran melalui P-APBD Tahun 2026.

Sedangkan faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dari sasaran kinerja lainnya beserta tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.

Faktor Keberhasilan :

1. Nilai Sakip Perangkat Daerah yang mana target 82,57 masih dalam proses penyusunan dokumen Sakip;
2. Adanya keterlibatan ASN Dinas Sosial dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Faktor Kegagalan :

1. Masih ada beberapa dokumen yang belum *tercover* dan terdokumentasikan;
2. Perlu adanya penambahan anggaran untuk Sub. Kegiatan yang mana di APBD Tahun 2026 tidak teranggarkan;
3. Kurangnya sosialisasi dari BKPSDM untuk pelatihan/diklat/webinar/dll bagi ASN.

Tindak lanjut :

1. Mendokumentasikan evaluasi dan monitoring kegiatan;
2. Usulan penambahan anggaran melalui P-APBD Tahun 2026;
3. Sosialisasi dari BKPSDM untuk pelatihan/diklat/webinar/dll bagi ASN.

2.2. Review Terhadap Rancangan P-RKPD

Berdasarkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan rancangan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui mekanisme / tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik).

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam

perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Selengkapnya sebagaimana tabel 2.3. (Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) berikut :

DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

NO	RANCANGAN AWAL RKPD										
	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKA TOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU INDIKATIF SETELAH REFOCUSING (Rp)	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Nilai Sakip Perangkat Daerah	82,57					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosi al	Nilai Sakip Perangkat Daerah
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial			5.815.082.676	5.815.082.676	5.815.082.676	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial	

		Dinas Sosial	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90%					Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan	Dinas Sosial	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,15%							Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial			5.815.082.676	5.815.082.676	5.815.082.676	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Kinerja PD yang tercapai minimal 90%	90%	17.024.200	17.024.200	17.024.200	0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Kinerja PD yang tercapai minimal 90%
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	8.512.100	8.512.100	8.512.100	0	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	8.512.100	8.512.100	8.512.100	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase hasil temuan pemeriksaan laporan keuangan yang ditindaklanjuti	96,15%	3.976.703.000	3.976.703.000	3.976.703.000	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase hasil temuan pemeriksaan laporan keuangan yang ditindaklanjuti
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	3.976.703.000	3.976.703.000	3.976.703.000	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar

	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai standar	90%	286.273.726	286.273.726	286.273.726	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.110.930	44.110.930	44.110.930	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	12 Paket	162.162.796	162.162.796	162.162.796	0	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai standar	90%	639.000.000	639.000.000	639.000.000	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai standar
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225.000.000	225.000.000	225.000.000	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	414.000.000	414.000.000	414.000.000	0	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%	796.081.750	796.081.750	796.081.750	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos)	206.441.350	206.441.350	206.441.350	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 Unit	510.591.350	510.591.350	510.591.350	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	8 Unit	79.049.050	79.049.050	79.049.050	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi

	Meningkatnya PPKS yang Mandiri	Dinas Sosial	Persentase PPKS yang Mandiri	0,067%					Meningkatnya PPKS yang Mandiri	Dinas Sosial	Persentase PPKS yang Mandiri
2	PROGRAM PEMBERDAYAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100%	248.131.319	248.131.319	248.131.319	0	PROGRAM PEMBERDAYAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	100%	248.131.319	248.131.319	248.131.319	0	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	47 Lembaga	53.620.959	53.620.959	53.620.959	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/KotaPeningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	62 Orang	194.510.360	194.510.360	194.510.360	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/KotaPeningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial			4.971.900.580	4.971.900.580	4.971.900.580	0	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	

	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	90%	159.923.280	159.923.280	159.923.280	0	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase Desa yang updating SIKS-NG
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar	5%	112.088.280	112.088.280	112.088.280	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	215.000 Usulan	112.088.280	112.088.280	112.088.280	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	0,20%	47.835.000	47.835.000	47.835.000	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha

	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang	47.835.000	47.835.000	47.835.000	0	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	12,05%	4.811.977.300	4.811.977.300	4.811.977.300	0	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri	0,024%	4.811.977.300	4.811.977.300	4.811.977.300	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri

	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.430 PM	4.811.977.300	4.811.977.300	4.811.977.300	0	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial			123.141.600	123.141.600	123.141.600	0	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	100%	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat

	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar	100%	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar
	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	10.000 Orang	90.000.000	90.000.000	90.000.000	0	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota
	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	10.000 Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota

	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	10.000 Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100%	13.141.600	13.141.600	13.141.600	0	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif

	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Orang	13.141.600	13.141.600	13.141.600	0	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	0,21%	1.569.481.100	1.569.481.100	1.569.481.100	0	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar

	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	0,17%	1.369.879.950	1.369.879.950	1.369.879.950	0	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial
	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemuenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	307 Orang	700.000.000	700.000.000	700.000.000	0	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemuenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota
	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	196.346.600	196.346.600	196.346.600	0	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota

	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	49 Orang	196.152.400	196.152.400	196.152.400	0	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	176.444.800	176.444.800	176.444.800	0	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	10 Orang	4.030.300	4.030.300	4.030.300	0	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota

	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	4.402.600	4.402.600	4.402.600	0	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	11.255.000	11.255.000	11.255.000	0	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberian Layanan Kedaruratan Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang	66.248.250	66.248.250	66.248.250	0	Pemberian Layanan Kedaruratan Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	0,04%	199.601.150	199.601.150	199.601.150	0	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial

	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kab / Kota	205 Orang	195.296.900	195.296.900	195.296.900	0	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kab / Kota	15 Orang	4.304.250	4.304.250	4.304.250	0	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100%	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik

	Pemeiiharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Persentase Makam yang terpenuhi pemeliharaannya	100%	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	Pemeiiharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Persentase Makam yang terpenuhi pemeliharaannya
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	6 Makam	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
					12.742.737.275	12.742.737.275	12.742.737.275	0			

Sumber Data Dinas Sosial

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat tiga pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya.

Selanjutnya dari hasil penelitian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan pihak pemangku kepentingan, antara lain :

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes;
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu -isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kabupaten.

Berikut ini usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 :

(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

TABEL 2.4.

USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN ANGGARAN 2026
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada P-APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan aplikasi SIPD Kabupaten Mojokerto dengan pagu sementara yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Mojokerto sebesar **Rp. 12.709.568.415,-** (Dua Belas Milyard Tujuh Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah) adalah sebagaimana tabel berikut :

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA-BELANJA SKPD						
KAB. MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2026														
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2026														
SKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL								Rp11.496.981.892,00	Rp1.245.755.383,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.742.737.275,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp11.496.981.892,00	Rp1.245.755.383,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.742.737.275,00		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			Rp11.496.981.892,00	Rp1.245.755.383,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.742.737.275,00		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp5.342.148.293,00	Rp472.934.383,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.815.082.676,00		
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp17.024.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.024.200,00		
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.512.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.512.100,00		

1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.512.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.512.100,00	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp3.976.703.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.976.703.000,00	

Uraian	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.976.703.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.976.703.000,00	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp297.299.926,00	Rp88.973.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp386.273.726,00	
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.026.200,00	Rp88.973.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp44.110.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.110.930,00	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp162.162.796,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp162.162.796,00	

1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	
---	----	----	------	------	--	--	--	--	-----------------	--------	--------	--------	-----------------	--

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp639.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp639.000.000,00	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp225.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.000.000,00	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp414.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp414.000.000,00	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp412.121.167,00	Rp383.960.583,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp796.081.750,00	
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp206.441.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp206.441.350,00	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp126.630.767,00	Rp383.960.583,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp510.591.350,00	
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp79.049.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.049.050,00	

1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Rp248.131.319,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.131.319,00	
---	----	----	--	--	-----------------------------	--	------------------	--------	--------	--------	------------------	--

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				Rp248.131.319,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.131.319,00	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp53.620.959,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.620.959,00	
1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp194.510.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp194.510.360,00	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Rp1.569.481.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.569.481.100,00	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				Rp1.369.879.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.369.879.950,00	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp700.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.000.000,00	
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp196.346.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp196.346.600,00	

1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan,		Rp196.152.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp196.152.400,00	
---	----	----	------	------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	------------------	--------	--------	--------	------------------	--

Uraian	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Semua Kelurahan/Desa							
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp176.444.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.444.800,00	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.030.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.030.300,00	
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.402.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.402.600,00	
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.255.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.255.000,00	

1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan,		Rp66.248.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.248.250,00	
---	----	----	------	------	-------------------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------	--------	--------	--------	-----------------	--

Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Semua Kelurahan/Desa							
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				Rp199.601.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.601.150,00	
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp195.296.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.296.900,00	
1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.304.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.304.250,00	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Rp4.199.079.580,00	Rp772.821.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.971.900.580,00	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Rp4.199.079.580,00	Rp772.821.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.971.900.580,00	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp47.835.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.835.000,00	
1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		,		Rp4.039.156.300,00	Rp772.821.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.811.977.300,00	

1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp112.088.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.088.280,00	
---	----	----	------	------	---	--	--	--	------------------	--------	--------	--------	------------------	--

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Rp123.141.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.141.600,00	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				Rp110.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.000.000,00	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				Rp13.141.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.141.600,00	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.141.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.141.600,00	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	

1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan,		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	
---	----	----	------	------	---	--	-------------------------------------	--	-----------------	--------	--------	--------	-----------------	--

Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
							Semua Kelurahan/Desa						

3.	M. IWAN ABDILLAH, SH, S.Sos, M.Si	197802232002121004	SEKRETARIS	
4.	TATANG MARHAENDRATA, SH., MH.	196706261987031002	ANGGOTA	

5.	NURYADI, SH, MM.	197008201992011002	ANGGOTA	
6.	Drs. SISWADI, MM.	196608101987011002	ANGGOTA	
7.	NURUL ISTIQOMAH, SE, MM.	197111161997032004	ANGGOTA	
8.	BENY WINARNO, SH, MH.	198211182010011009	ANGGOTA	
9.	YURDIANSYAH, ST.	198310182010011008	ANGGOTA	
10.	Dra. HEVI MAIDA LAILY, M.Si.	197005281994032003	ANGGOTA	
11.	YUNI LAILI FAIZAH, ST.	197706072001122005	ANGGOTA	

*) Sesuai periodisasi SPD

*) Sesuai periodisasi SPD

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah kinerja lainnya yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial, dengan indikator kinerja program sebagai berikut :

- a) Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan, dengan target 90%;
 - b) Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, dengan target 96,15%.
2. Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator kinerja program :

- a) Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan indikator sasaran kegiatan yaitu Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat.

Program Pemberdayaan Sosial tersebut Mendukung Program Bupati PEDULI PPKS dan MILENIAL KREATIF.

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan indikator kinerja program :

- a) Persentase Desa yang updating SIKS-NG, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan indikator sasaran kegiatan yaitu :

- Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar;
- Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha.

- b) Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan indikator sasaran kegiatan yaitu Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut Mendukung Program Bupati PEDULI PPKS, PEREMPUAN BERKARYA, dan GERCEP STUNTING.

4. Program Penanganan Bencana dengan indikator kinerja program :
 - a) Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan indikator sasaran kegiatan yaitu Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar.
 - b) Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan indikator sasaran kegiatan yaitu Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat.
Program Penanganan Bencana tersebut Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS.
5. Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja program :
 - a) Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan dengan indikator sasaran kegiatan yaitu Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial.
Program Rehabilitasi Sosial tersebut Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator kinerja program Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan indikator sasaran kegiatan yaitu Persentase Makam yang terpenuhi pemeliharaannya.

Adapun uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 ada pada Tabel 3.1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) di bawah ini.

Tabel 3.1.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Tujuan			Sasaran Strategis			Program				Kegiatan				Sub kegiatan			
Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target 2026		Uraian	Indikator Kegiatan	Target 2026		Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target 2026	
								Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,75 %	Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang mandiri	0,067 %	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100%	248.141.900	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	100 %	248.141.900	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	62 Orang	98.167.400
														2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Lembaga	149.974.500

						Program Perlindung an Dan Jaminan Sosial	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	90%	134.724.38 0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Data kesejahteraa n sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar	5%	86.889.380	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usulan Penindaklaya kan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	304 Desa	86.889.380
											Persentase PPKS yang mendapatka n fasilitasi pengembang an usaha	0,20 %	47.835.000	2. Fasilitasi Bantuan Pengemban gan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatka n Bantuan Pengembang an Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang	47.835.000
							Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	12,05 %	4.797.477. 300	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri	0,024 %	4.797.477. 300	3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahtera an Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatka n Bantuan Sosial Kesejahteraa n Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	7.430 Keluara ga	4.797.477. 300

						Program Penangan an Bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	100%	110.000.00 0	1. Perlindunga n Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/K ota	Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar	100%	110.000.00 0	1. Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatka n Permakana n 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/K ota	1.000 Orang	90.000.000
														2. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	1.000 Orang	10.000.000
														3. Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatka n Layanan Dukungan Psikososial	1.000 Orang	10.000.000

															Kewenangan Kabupaten/ Kota		
							Persentase Potensi dan Sumber Kesejahter aan Sosial aktif	100%	13.141.600	2. Penyelengga raan Pemberdaya an Masyarakat terhadap Kesiapsiaga an Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraa n Sosial yang mendapatka n sertifikat	100%	13.141.600	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksana n Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	46 Orang	13.141.600
						Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	0,21 %	1.459.536. 300	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandanga n Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatka n rehabilitasi sosial	0,17 %	1.274.769. 400	1. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	307 Orang	700.000.00 0
														2. Penyedian Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	50 Orang	196.346.60 0

															8. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	3.780.000				
															9. Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	87.350.100				
															2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	0,04 %	184.766.900	1. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	205 Orang	184.766.900

Tujuan			Kinerja Lainnya			Program				Kegiatan				Sub kegiatan			
Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target 2026		Uraian	Indikator Kegiatan	Target 2026		Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target 2026	
								Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	82,57	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariat	90%					5.931.546.935				
							2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,15 %									
										1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai minimal 90%	90%	5.820.000	1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	2.910.000
														2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	2.910.000
							Administrasi Kepegawaian Perangkat				Indeks Profesionalitas ASN	81,50					

										Daerah							
										2. Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaa n laporan keuangan yang ditindaklanj uti	96,15 %	3.976.703. 000	1. Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bul an	3.976.703. 000
										3. Administr asi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaa n Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%	198.509.10 0	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	198.509.10 0
											Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai standar	90%	241.833.22 6	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.110.930
														3. Penyediaan Bahan/Mate rial	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	117.722.29 6
														4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000
														5. Penyelenggar aan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	60.000.000

														Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
										4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai standar	90%	639.000.000	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225.000.000
														2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	414.000.000
										5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%	869.681.609	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	165.168.250
														2. Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	625.464.309

																Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara / Direhabilitasi		
																3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	79.049.050

Sumber Data Dinas Sosial

Sedangkan penggunaan anggaran pada Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sesuai dengan Rincian Sub Kegiatan (RSK) ada pada Tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2.
RSK P-APBD DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2026

KODE/REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DAANA	RINCIAN PENGUNAAN BELANJA	LABEL LING/ TAGGING SUB KEGIATAN	RANCANGAN RENJA P-2026				HASIL PEMBAHASAN FPD			
														TARGET	ANGGARAN	TAMBAH (KURANG)	KETERANGAN	TARGET	ANGGARAN	TAMBAH (KURANG)	KETERANGAN
1	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat kepuasan pengguna layanan kesekretariatan 2. Persentase Realisa		1. 90 % 2. 96,15 %	5.815.082.676				1. 90 % 2. 96,15 %	5.993.868.576	178.785.900					

							si Anggar an Perang kat daerah													
1	0	0	2.			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen tase Kinerja Perang kat Daerah yang tercap ai Minim al 90%	Kab upat en Moj oker to	90%	17.024.20 0				90%	16.974.20 0	-50000				
1	0	0	2.	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokum en Perenc anaan Perang kat Daerah	Kab upat en Moj oker to	9 Doku men	8.512.100	DA U	Penyusu nan Ranwal Renja, Rancang an Renja, Rankhir Renja,		9 Doku men	8.487.100	(25.000)				

											Renja, Rancang an Perubah an, Perubah an Renja, Rancang an Renstra, Perjakin APBD dan P- APBD												
						Rincian:																	
5	1	0	1	1	00 02 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				37.100		pembul atan			37.100	-							
5	1	0	0	0	00 00 0 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				1.475.000		Rapat koordin asi dengan instansi vertikal (Provinsi dan K/L)			8.450.000	6.975.000							

											dan stakeholder terkait													
5	1	0 2	0 4	0 0 0 1	00 00 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				7.000.000				-	(7.000.000)									
1	0 6	0 1	2. 0 2	0 0 7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL	10 Laporan	8.512.100	DAU	Penyusunan Laporan SPM, LPPD, LKJIP, LKPJ, AKSARA, SAKIP, Satu Data Palapa, SPIP, KKS, SDG's.		10 Laporan	8.487.100	(25.000)								
						Rincian:									-									

5	1	0	1	1	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			37.100		pembulatan		37.100	-					
5	1	0	0	0	00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1.475.000		Rapat koordinasi dengan instansi vertikal (Provinsi dan K/L) dan stakeholder terkait		8.450.000	6.975.000					
5	1	0	0	0	00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			7.000.000				-	(7.000.000)					
1	0	0	2.			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perang	DINAS SOSIAL	96,15 %	3.976.703.000	DAU		96,15 %	3.976.703.000	0				

							kat Daerah														
6	0	0	2.	0			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan Tunjan gan ASN	DIN AS SOSI AL	40 Oran g/Bul an	3.976.703. 000	DA U	Penyedi aan Gaji dan Tunjang an ASN		40 Oran g/Bul an	3.976.703 .000	-				
							Rincian :										-				
5	1	0	0	0	00		Belanja Gaji Pokok PNS				1.534.407. 000		Belanja Gaji Pokok PNS (1 Tahun)			1.534.407 .000	-				
5	1	0	0	0	00		Belanja Gaji Pokok PPPK				83.212.00 0		Belanja Gaji Pokok PPPK (1 Tahun)			83.212.00 0	-				

5	1	0	0	0	00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				129.625.000		Belanja Tunjangan Keluarga PNS (1 Tahun)			129.625.000	-				
5	1	0	0	0	00	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK				6.531.000		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK (1 Tahun)			6.531.000	-				
5	1	0	0	0	00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				118.804.000		Belanja Tunjangan Jabatan PNS (1 Tahun)			118.804.000	-				
5	1	0	0	0	00	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				77.751.000		Belanja Tunjangan Fungsional PNS (1 Tahun)			77.751.000	-				

5	1	0	0	0	00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				24.243.000		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (1 Tahun)			24.243.000	-				
5	1	0	0	0	00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK				5.315.000		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK (1 Tahun)			5.315.000	-				
5	1	0	0	0	00	Belanja Tunjangan Beras PNS				62.942.000		Belanja Tunjangan Beras PNS (1 Tahun)			62.942.000	-				
5	1	0	0	0	00	Belanja Tunjangan Beras PPPK				5.273.000		Belanja Tunjangan Beras PPPK (1 Tahun)			5.273.000	-				

5	1	0	0	0	00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				11.915.00 0		Belanja Tunjang an PPh/Tun jangan Khusus PNS (1 Tahun)		11.915.00 0	-						
5	1	0	0	0	00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK				-		Belanja Tunjang an PPh/Tun jangan Khusus PPPK (1 Tahun)		-	-						
5	1	0	0	0	00	Belanja Pembulatan Gaji PNS				165.000		Belanja Pembul atan Gaji PNS (1 Tahun)		165.000	-						
5	1	0	0	0	00	Belanja Pembulatan Gaji PPPK				17.000		Belanja Pembul atan Gaji		17.000	-						

5	1	0	0	0	00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK				600.000		Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK (1 Tahun)			600.000	-				
5	1	0	0	0	00	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS				7.673.000		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS (1 Tahun)			7.673.000	-				
5	1	0	0	0	00	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK				417.000		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			417.000	-				

											han Rakyat PPPK (1 Tahun)									
5	1	0	0	0	00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				1.794.650. 000	Tambah an Penghas ilan berdasa rkan Beban Kerja PNS (1 Tahun)			1.794.650 .000	-					
5	1	0	0	0	00	Belanja Honorrarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				98.232.00 0	Honorar ium Penggun a Anggara n, PPK SKPD, Pemban tu PPK SKPD, Penguru s Barang Penggun			98.232.00 0	-					

											a, Bendah ara Pengelu aran, Pemban tu Bendah ara Pengelu aran (PPK)													
6	0	0	2.			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen tase Keters ediaan Sarana dan Prasara na Kantor sesuai standa r	DIN AS SOSI AL	90%	386.273.7 26	DA U		90%	386.273.7 26	-									
6	0	0	2.	0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlen	DIN AS	12 Paket	100.000.0 00	DA U	Tersedia nya Peralata	12 Paket	100.000.0 00	-									

				0 2			gkapan dan peralat an kantor yang disedia kan	SOSI AL				n dan Perleng kapan Kantor										
							Rincian :										-					
5	1	0 2	0 1	0 0 1	00 02 4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				28.500		pembul atan			28.500	-					
5	1	0 2	0 1	0 0 1	00 02 9		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				260.700		belanja 1 buah keyboar d dan moouse wireless			260.700	-					
5	1	0 2	0 1	0 0 1	00 03 0		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				2.577.000		belanja 2 unit blender dan 6			2.577.000	-					

6	0	0	2.	0		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DIN AS SOSIAL	12 Paket	20.000.000	DA U	Tersedia nya Barang Cetak dan Penggandaan		12 Paket	20.000.000	-						
						Rincian :										-						
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				150		pembulatan			150	-						
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				17.754.650		belanja cetak banner, map dinas, kertas kop, dan fotocopy			17.754.650	-						

5	1	0	0	0	00	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				2.245.200		belanja koran harian 12 bulan			2.245.200	-						
6	0	0	2	0		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Materi al yang Disedia kan	DIN AS SOSI AL	12 Paket	162.162.7 96	DA U	Tersedia nya Bahan/ Material		12 Paket	162.162.7 96	-						
						Rincian :										-						
5	1	0	0	0	00	Belanja Bahan-Bahan Kimia				2.707.500		belanja shampo o			2.707.500	-						
5	1	0	0	0	00	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				2.000.250		belanja sikat gigi			2.000.250	-						
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				32.468.54 6		Belanja ATK dinas			32.468.54 6	-						

5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				32.830.200		belanja kertas HVS Folio dan A4			32.830.200	-				
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos				483.000		belanja materai			483.000	-				
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				84.306.000		belanja tinta printer cair dan tinta printer toner hitam			84.306.000	-				
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				6.242.300		Belanja pasta gigi, sabun batangan dan sabun cair			6.242.300	-				

5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			1.125.000		Belanja tissue		1.125.000	-						
6	0	0	2	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINAS SOSIAL	12 Laporan	60.000.000	DAU	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000	-					
						Rincian :									-					
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			60.000		pembulatan		60.000	-						

5	1	0	0	0	00	Belanja Perjalanan Dinas				26.340.00		belanja biaya penginapan pejabat eselon II dan tiket pesawat kelas ekonomi , uang harian luar kota, uang harian luar kota dalam provinsi		26.340.00	-				
		2	4	0	00	Biasa				0				0					
				0	1														
5	1	0	0	0	00	Belanja Perjalanan Dinas				33.600.00		belanja uang harian pertemuan		33.600.00	-				
		2	4	0	00	Dalam Kota				0				0					
				0	3														
				1															

											dalam kota											
60602.						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen tase Pelaya nan Umum yang Terlaks ana sesuai standa r	DIN AS SOSI AL	90%	639.000.000	PA D			90%	639.000.000	-						
60602.						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lapora n Penyed iaan Jasa Komun ikasi, Sumbe r Daya Air dan Listrik yang	DIN AS SOSI AL	12 Laporan	225.000.000	DA U	Tersedia nya Laporan Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	225.000.000	-	Pergeser an antar rekening belanja untuk tambah daya listrik					

											golongan P-1					air untuk keperluan tambahan daya listrik				
5	1	0	0	0	00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				13.736.400		belanja tagihan telepon dan internet 12 bulan			13.736.400	-				
5	1	0	0	0	00	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				30.240.000		honor PPTK 12 bulan			30.240.000	-				
6	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	DINAS SOSIAL	12 Laporan	414.000.000	DAU	Tersedia nya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan	414.000.000	-				

							standa r														
1	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendar aan Dinas Operas ional atau Lapang an yang Dipelih ara dan dibayar kan Pajak dan Perizin annya	DIN AS SOSI AL	12 unit	206.441.3 50	DA U	Kendara an Dinas Operasi onal atau Lapanga n yang Dipeliha ra dan dibayark an Pajak dan Perizina nnya	12 unit	206.441.3 50	-						
5	1	0	0	0	00 00 0 1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				100.446.8 00		Belanja BBM dan pelumas kendara an dinas		100.446.8 00	-						

5	1	0	0	0	00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan				6.673.600		Belanja ban luar mobil dinas			6.673.600	-				
		2	1	0	01															
				0	3															
				1																
5	1	0	0	0	00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya				20.931.200		Belanja ban luar motor dinas, kampas rem dan, kampas kopling mobil dinas			20.931.200	-				
		2	1	0	02															
				0	3															
				1																
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				5.450		pembulatan			5.450	-				
		2	1	0	02															
				0	4															
				1																
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				5.494.500		Belanja suku cadang kendaraan (accu)			5.494.500	-				
		2	1	0	03															
				0	1															
				1																

5	1	0	0	0	00	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				10.739.80 0		Biaya pembay aran pajak STNK kendara an dinas		10.739.80 0	-						
5	1	0	0	0	00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				58.500.00 0		Biaya pemelih araan/s ervis kendara an dinas operasio nal		58.500.00 0	-						
5	1	0	0	0	00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				3.650.000		Biaya pemelih araan/s ervis kemdar aan dinas roda dua		3.650.000	-						

1	0	0	2.	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedun g Kantor dan Bangu nan Lainny a yang Dipelih ara / Direha bilitasi	DIN AS SOSI AL	5 Unit	510.591.3 50	DA U	Terpelih aranya Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya	5 Unit	689.427.2 50	178.835.9 00	Usulan penamba han pagu untuk pembang unan pagar samping UPTD dan pergeser an pagu antar rekening untuk gaji tenaga Kebersiha n dan Keamana n				
5	1	0	0	0	00 00 0 1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				29.483.94 9		Pemasa ngan rangka atap		-	(29.483.94 9)	Dialihkan ke rekening belanja jasa tenaga				

5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				7.464.488		Pemasangan pintu gedung pertemuan			-	(7.464.488)	Dialihkan ke rekening belanja jasa tenaga				
		2	1	0	02																
				0	4																
				1																	
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				1.971.010		Pemasangan lampu gedung pertemuan			-	(1.971.010)	Dialihkan ke rekening belanja jasa tenaga				
		2	1	0	03																
				0	1																
				1																	
5	1	0	0	0	00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				-		Jasa Tenaga Cleaning Service Non peralatan kebersihan			54.286.848	54.286.848	Jasa Tenaga Cleaning Service Non peralatan kebersihan				
		2	2	0	03																
				0	0																
				1																	
5	1	0	0	0	00	Jasa Tenaga Keamanan				-		Jasa Tenaga Keamanan			54.000.000	54.000.000	Jasa Tenaga Keamana				
		2	2	0	03																
				0	1																
				1																	

5	1	0	0	0	00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				68.477.525		Pekerjaan pembonngkaran dan persiapan			-	(68.477.525)	Dialihkan ke rekening belanja jasa tenaga				
5	1	0	0	0	00	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi				1.341.651		Pemasangan titik instalasi lampu			-	(1.341.651)	Dialihkan ke rekening belanja jasa tenaga				
5	1	0	0	0	00	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya				17.892.144		Pemasangan backdropp gedung pertemuan			-	(17.892.144)	Dialihkan di rekening belanja modal bangunan gedung kantor				
5	1	0	0	0	00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				32.413.050		Pemasangan backdropp gedung			32.413.050	-					

											pertemu an										
5	2	0	0	0	00	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor				351.547.5 33	Pemasa ngan dinding dan atap			548.727.3 52	197.179.8 19	Usulan penamba han pagu untuk pembang unan pagar samping UPTD					
1	0	0	2.	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasara na Gedun g Kantor atau Bangu nan Lainny a yang Dipelih ara /	DIN AS SOSI AL	8 Unit	79.049.05 0	DA U	Terpelih aranya Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya		8 Unit	79.049.05 0	-					

							Direhabilitasi														
							Rincian:									-					
5	1	0	0	0	00	00	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				8.249.950		Belanja bahan bangunan (cat, kuas, tiner)			8.249.950	-				
		2	1	0	00	01															
5	1	0	0	0	00	00	Belanja Bahan-Bahan Kimia				7.346.250		Belanja bahan kimia (cairan pencuci piring, deterjen , pember sih kaca) untuk dinas dan UPT			7.346.250	-				
		2	1	0	00	01															

5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.350		pembulatan			1.350	-				
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				11.495.100		Belanja perabot kantor untuk pemeliharaan rutin di kantor dinas dan UPT			11.495.100	-				
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				3.366.400		belanja lampu bolam LED			3.366.400	-				
5	1	0	0	0	00	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum				7.990.000		Belanja jasa tukang			7.990.000	-				
5	1	0	0	0	00	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-				12.200.000		Biaya pemeliharaan			12.200.000	-				

				01		Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin						servis AC										
5	1	02	03	00052	00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				14.600.000		Biaya pemeliharaan servis komputer/note book			14.600.000	-						
5	1	02	03	00092	00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				13.800.000		Biaya pemeliharaan servis printer			13.800.000	-						
5	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	Kabupaten Mojokerto	100%	248.131.319				100%	248.131.319	-						

5	1	0	0	0		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persen tase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	Kab upat en Moj oker to	100%	248.131.319				100%	248.131.319	0							
5	1	0	0	0	00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewen	Kab upat en Moj oker to	65 Lemb aga	194.510.360	DA U		Subkegiatan ini mendukung : (Lihat Sheet LABEL TAG SUBKEGIATAN)	47 Lemb aga	194.510.360	-							

							angan Kabup aten/ Kota							1. PUD. 2.6 Progr am gerak an perce patan penur unan stunti ng (GERC EP STUN TING) ==> Subke giatan Penyu sunan Dokre n OPD tertag ging Penan ganan Stunti													
							Rincian :										-										
5	1	0	0	0	00		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				5.060		Pembulatan		5.060		-										
5	1	0	0	0	00		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				1.083.300		Belanja sertifikat dan banner bimtek dasar PSM		1.083.300		-										
5	1	0	0	0	00		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				25.500.000		Belanja jas dan rompi PSM		25.500.000		-										
5	1	0	0	0	00		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12.742.000		Mamin Rakor, Bimtek dan Penguku		12.742.000		-										

[illegible]

5	1	0	0	0	00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				21.500.000		Narasumber bimtek dasar PSM. Rakor dan pengukuhan PSM			21.500.000	-						
5	1	0	0	0	00	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan				108.000.000		Honorarium TKSK			108.000.000	- 96.000.000	Karena hanya tersisa 2 orang TKSK yang belum mendapatkan SK Kementerian (SK PPPK)					
5	1	0	0	0	00	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				4.230.000		Honorarium TKSK			4.230.000	-						

5	1	0	0	0	00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				4.450.000		Belanja Perjalanan dinas koordinasi terkait narasumber dan materi bimtek dasar ke IPSM Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi		4.450.000	-					
5	1	0	0	0	00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				17.000.000		Bantuan Transport peserta dan perjalanan dinas dalam kota		17.000.000	-	Merubah Volume SPPD dalam daerah karena berubah spesifikasi (160rb untuk 8jam).				

																	Dari 70 orang/pe rhari jadi 43 orang/pe rhari					
5	1	06	02.	03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyul uh Sosial, Penyul uh Sosial Masyar akat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyar akat dan/at au Tenaga Keseja hteraa n Sosial	Kab upat en Moj oker to	69 Oran g	53.620.959	DA U		Subke giatan ini mend ukung : (Lihat Sheet LABEL TAG SUBK EGIAT AN) 1. PUD. 2.6 Progr am gerak an perce patan	68 Oran g	53.620.959	-						

							Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya						penurunan stunting (GERCEP STUNTING)								
							Rincian :						=>								
5	102000	001014				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				2.003.400		Bahan bakar untuk transportasi penilaian Lomba Karang Taruna	Subkegiatan Penyusunan Dokren OPD tertagging Penanganan Stunting pada SIPD RI (Apabila		2.003.400	-					
5	102000	001014				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				459		Pembulan			459	-					
5	102000	001016				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				457.100		Banner lomba Karang Taruna			457.100	-					

5	1	0	0	0	00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				15.400.00 0	Bantuan transpor t peserta pemin aan LKS dan koordin asi kelemba gaan ke LKS dan Karang Taruna		15.400.00 0	-	Merubah Volume SPPD dalam daerah karena berubah spesifikas i (160rb untuk 8jam). Dari 64 orang/pe rhari jadi 40 orang/pe rhari				
5	1	0	0	0	00	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan				13.500.00 0	Belanja Hadiah lomba Karang Taruna		13.500.00 0	-					
1	0	0				Program Rehabilitasi Sosial	Persen tase PPKS yang menda	Kab upat en Moj	0,21 %	1.569.481. 100	AP BD		0,21 %	1.459.736 .300	(109.744.8 00)				

							pat pelaya nan rehabil itasi sosial yang sesuai standa r	oker to													
1	0 6	0 4	2. 0 1			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Persen tase PPKS yang menda patkan rehabil itasi sosial	Kab upat en Moj oker to	0,17 %	1.369.879. 950				0,17 %	1.260.135 .150	(109.744.8 00)					
1	0 6	0 4	2. 0 1 0 0 1			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Menda patkan Pemen uhan Kebutu	Kab upat en Moj oker to	850 orang	700.000.0 00	DA U			350 Oran g	700.000.0 00	-					

							han Perma kanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewen angan Kabup aten / Kota															
							Rincian :															
5	1	0	0	0	00	00	Belanja Bahan - Isi Tabung Gas				17.280.000		Pengisian gas LPG			17.280.000	-	Pengisian gas LPG				
5	1	0	0	0	00	02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				100		Pembulatan			100	-	Pembulatan				
5	1	0	0	0	00	02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				276.300		Fotocopy			276.300	-	Fotocopy				

5	1	0	0	0	00	Belanja Natura dan Pakan-Natura				609.103.600		Belanja Bahan Permak anan		609.103.600	-	Belanja Bahan Permaka nan				
		2	1	0	04															
				1	3															
5	1	0	0	0	00	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				6.440.000		honorari um PPTK		6.440.000	-	honorari um PPTK				
		2	2	0	08															
				1	0															
5	1	0	0	0	00	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat				66.900.000		Beras untuk anak LKSA		66.900.000	-	Beras untuk anak LKSA				
		6	3	0	00															
				2	1															
1	0	0	2.	0		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Meneri ma Pakaia n dan Keleng kapan Lainny a yang Tersedi a dalam 1 Tahun	Kab upat en Moj oker to	50 orang	196.346.600	DA U			50 Oran g	196.546.600	200.000				
	6	4	0	0																
			1	0																
			2	2																

[illegible]

5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-lat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya			161.239.000		pengada an Popok dewasa		166.574.000	5.335.000	pengadaa n Popok dewasa				
1	0	0	2	0		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Mojokerto	51 Orang	196.152.400	APBD		53 Orang	196.152.400	0				
						Rincian :													

5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				250		Pembulatan		250	-	Pembulatan				
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				578.750		Cetak dan fotocopy		578.750	-	Cetak dan fotocopy				
5	1	0	0	0	00	Belanja Natura dan Pakan-Natura				5.870.850		Bahan untuk praktek Pelatiha n Tata Boga		5.870.850	-	Bahan untuk praktek Pelatihan Tata Boga				
5	1	0	0	0	00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				5.175.850		Makan dan Minum untuk Peserta Pelatiha n Tata Boga		5.175.850	-	Makan dan Minum untuk Peserta Pelatihan Tata Boga				
5	1	0	0	0	00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				5.000.000		Honor Narasumber		5.000.000	-	Honor Narasumber Pelatihan				

											disabilit as					disabilita s					
1	0	0	2.	0		Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Menda patkan Pelaya nan Reunifi kasi Keluar ga Kewen angan Kabup aten/K ota	Kab upat en Moj oker to	15 Oran g	15.000.00 0	AP BD			15 Oran g	15.000.00 0	0					
						Rincian :															
5	1	0	0	0	00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				7.600.000		Perjalan an dinas untuk pemula ngan orang terlanta r dalam			7.600.000	-	Perjalana n dinas untuk pemulan gan orang terlantar dalam				

											kabupat en					kabupate n					
5	1	0 2	0 4	0 0 1	00 00 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				7.400.000		Perjalan an dinas untuk pemula ngan orang terlanta r diluar kabupat en			7.400.000	-	Perjalana n dinas untuk pemulan gan orang terlantar diluar kabupate n				
1	0 6	0 4	2. 0 1	0 0 0 3		Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Pesert a Bimbin gan Fisik, Mental , Spiritu al dan Sosial Kewen angan Kabup	Kab upat en Moj oker to	50 Oran g	176.444.8 00	DA U			50 Oran g	66.500.00 0	- 109.944.8 00					

5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				14.400.000	Fotocopy		93.150	(14.306.850)					
5	1	0	0	0	00	Belanja Obat-obatan - Obat				-	belanja obat		4.600.395	4.600.395					
5	1	0	0	0	00	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia				15.300.000	Jasa Psikolog		13.600.000	(1.700.000)	pembelian baju koko, daster, kerudung . Handscoon dan underpad				
5	1	0	0	0	00	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum				7.500.000	Jasa Tukang		7.500.000	-	pengadaan Popok dewasa				
5	1	0	0	0	00	Belanja Jasa kesenian dan kebudayaan				6.000.000	Jasa Penceramah Agama		6.000.000						
5	1	0	0	0	00	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				10.890.000	Honorarium PPTK		10.890.000						

5	1	0	0	0	00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				108.000.000										
5	1	0	0	0	00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				3.900.000		SPPD Pesurvey calon klien		3.600.000						
1	0	0	2.	0		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Kabupaten Mojokerto	9 Orang	4.030.300	APBD			10 Orang	4.030.300	0				

						Masyarakat Belanja Natura dan Pakan Natura					disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					
1	06	04	2.001	0009		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan kewenangan Kabup	Kabupaten Mojokerto	15 Orang	11.255.000	APBD			15 Orang	11.255.000	0					

							aten/K ota.																
							Rincian :																
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				200		Pembul atan			200	-	Pembulat an						
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				54.800		Fotocop y			54.800	-	Fotocopy						
5	1	0	0	0	00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			112 Oran g	11.200.00 0		Perjalan an dinas untuk asesme n dan home visit pengadu an masyara kat terkait permasa lahan sosial yang terjadi			11.200.00 0	-	Perjalana n dinas untuk asesmen dan home visit pengadu an masyarak at terkait permasal ahan sosial yang terjadi di Kabupate						

											di Kabupat en Mojoker to					n Mojokert o				
1	0	0	2.	0		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang menda patkan pelaya nan kedaru ratan kewen angan Kabup aten/K ota	Kab upat en Moj oker to	20 Oran g	66.248.25 0	AP BD		20 Oran g	66.248.25 0	0					
						Rincian :														
5	1	0	0	0	00 00 14	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				15.120.00 0		Pertama x untuk perjalan an dinas		15.120.00 0	-	Pertamax untuk perjalana n dinas				

5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				128.250		fotocopy			128.250	-	fotocopy				
		2	1	0	02																
				1	6																
5	1	0	0	0	00	Belanja jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum				5.100.000		Ongkos tukang (penguburan jenazah Orang Terlantar)			5.100.000	-	Ongkos tukang (penguburan jenazah Orang Terlantar)				
		2	1	0	01																
				1	6																
5	1	0	0	0	00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				28.500.000		Perjalanan dinas di dalam kabupaten untuk melaksanakan asesmen terkait permasalahan sosial pelayanan			28.500.000	-	Perjalanan dinas di dalam kabupaten untuk melaksanakan asesmen terkait permasalahan sosial pelayanan kedaruratan				
		2	1	0	00																
				1	1																

											asi terkait layanan akses pendidik an dan kesehat an dasar					i terkait layanan akses pendidika n dan kesehata n dasar				
1	0	0	2.			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persen tase PPKS yang menda patkan rehabil itasi sosial	Kab upat en Moj oker to	0,04 %	199.601.1 50				0,04 %	199.601.1 50	-				
1	0	0	2.	0		Penyediaan Permkanan	Jumlah Orang yang Menda patkan Pemen uhan Kebutu han Perma	Kab upat en Moj oker to	196 Oran g	195.296.9 00	AP BD			205 Oran g	195.296.9 00	-				

5	1	0	0	0	00	Belanja Natura dan Pakan-Natura				180.543.500	Bahan untuk kebutuhan pokok permakanaan eks kusta seperti minyak goreng, beras, mie instan, kecap		180.543.500	-	Bahan untuk kebutuhan pokok permakanaan eks kusta seperti minyak goreng, beras, mie instan, kecap				
5	1	0	0	0	00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				6.900.000	Perjalanan Dinas untuk Verifikasi dan Validasi dan Pengiriman bantuan		6.900.000	-	Perjalanan Dinas untuk Verifikasi dan Validasi dan Pengiriman bantuan				

1	0	0	2.	0		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan kartu identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewen	Kabupaten Mojokerto	15 Orang	4.304.250	APBD			15 Orang	4.304.250	-						
---	---	---	----	---	--	--	---	---------------------	----------	-----------	------	--	--	----------	-----------	---	--	--	--	--	--	--

										Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan kartu identitas Anak					Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan kartu identitas Anak				
1	0	0				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	Kabupaten Mojo	90%	159.923.280			90%	159.923.280	-				
1	0	0	2.			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverif	Kabupaten Mojo	5%	112.088.280			5%	112.088.280	-				

							ikasi dan tervali dasi sesuai standa r														
1	0	0	2.	0		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penind aklayak an, Usulan yang Terveri fikasi dan Tervali dasi, dan Usulan Perbai kan yang dilaksa nakan	Kab upat en Moj oker to	215.0 00	112.088.2 80	DA U		Subke giatan ini mend ukung : (Lihat Sheet LABEL TAG SUBK EGIAT AN) 1. PUD. 2.6 Progr am gerak an perce	215.0 00	112.088.2 80	-					
						Rincian :															

5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				5.680		Pembulatan	patan penurungan stunting		5.680	0						
		2	1	0	02																	
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				471.200		Banner kegiatan sosialisasi DTSEN dan PPKS	(GERCEP STUNTING) ==>		471.200	0						
		2	1	0	02																	
5	1	0	0	0	00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				24.500.000		Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Subkegiatan Penyusunan Dokumen OPD tertagging		37.600.000	13.100.000						
		2	4	0	00																	
				1	00																	
5	1	0	0	0	00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				16.300.000		Perjalanan di wilayah Kab. Mojokerto	Penanganan Stunting pada SIPD RI		3.200.000	- 13.100.000	Dialihkan ke Rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
		2	4	0	00								(Apabila tidak									
				1	00																	

												ada, koson gkan. Karen a tidak semu a subke giatan mend ukung secara langs ng PUD dan PSN)										
5	1	0 2	0 1	0 0 1	00 04 3	Belanja Natura dan Pakan- Natura				15.802.50 0		Belanja sembak o yang diberika n kepada masyara kat kurang mampu		15.802.50 0	0							

											an di kecamatan pada kegiatan sosialisasi DTSEN dan PPKS										
5	1	0	0	0	00	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				14.520.00 0		Honorarium PPTK			14.520.00 0	0					
5	1	0	0	0	00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				5.688.900		BBM Perjalanan Dinas Koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Stakeholder			5.688.900	0					
6	0	0	2.			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persen tase PPKS yang menda	Kab upat en Moj	0,20 %	47.835.00 0	DA U			0,20 %	47.835.00 0	-					

							patkan fasilita si penge mbang an usaha	oker to												
6	0	0	2.	0		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Menda patkan Bantua n Penge mbang an Ekono mi Masyar akat Kewen angan Kabup aten / Kota	Kab upat en Moj oker to	20 Oran g	47.835.00 0	DA U	Pemberi an bansos bagi pokmas		20 Oran g	47.835.00 0	0				
						Rincian :														

5	1	0	0	0	00	Banner Promkes 6 M2 X Rp. 64.200				294.500		Pembulatan			294.500	0						
						Photo Copy 1207 lembar x Rp. 450				333.000					333.000	0						
						Pembulatan ATK				200					200	0						
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor-Dalam Kota 9 orang X Rp. 160,000-				1.440.000					1.440.000	0						
						Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat 20 Orang				45.767.300					45.767.300	0						
1	0	0				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	Kabupaten Mojo	12,05 %	4.811.977.300				12,05 %	4.811.977.300	-						
1	0	0	2.			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang updati	Kabupaten Mojo	0,024 %	4.811.977.300				0,024 %	4.811.977.300	-						

							ng SIKS- NG	oker to													
1	0	0	2.	0		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Usulan Penind aklayak an, Usulan yang Terveri fikasi dan Tervali dasi, dan Usulan Perbai kan yang dilaksa nakan	Kab upat en Moj oker to	7.430	4.811.977.300	DA U, DB HC HT		Subke giatan ini mend ukung : (Lihat Sheet LABEL TAG SUBK EGIAT AN) 1. PUD. 2.6 Progr am gerak an perce patan penur unan stunti	7.430	4.811.977.300	0					
						Rincian :															
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				904.250		Pembul atan dan ATK			906.250	2.000					

5	1	0	0	0	00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				179.200.00		Perjalanan di Dinas di wilayah Kab. Mojokerto	Karena tidak semua subkegiatan mendukung secara langsung PUD dan PSN)		136.300.00	- 42.900.000	Dialihkan ke Rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
5	1	0	0	0	00	Belanja Natura dan Pakan-Natura				1.780.300		Belanja Bahan Baku pembuat kue kering untuk praktik			1.780.300	0					
5	1	0	0	0	00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				131.600.00		Makanan dan Minuman untuk			117.650.00	- 13.950.000					

											kegiatan rapat koordinasi dan penyaluran BLT DBHCHT									
5	1	0	0	0	00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				175.650.000		Honorarium narasumber			175.300.000	-350.000				
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				13.332.000		Belanja Rompi Lapangan untuk kegiatan DBHCHT			13.332.000	0				
5	1	0	0	0	00	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum				10.000.000		Notaris Sekolah Rakyat			10.000.000	0				
5	1	0	0	0	00	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan				104.730.000		Tarif wesel pos untuk penyalu			104.730.000	0				

											Lalu Lintas (Andalalin), Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Persetujuan Bangunan Gedung									
5	1	0	0	0	00	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)				2.618.250.000		BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan atau Buruh			2.618.250.000	0				
	2	5	0	0	00															

											Pabrik Rokok									
5	1	0	0	0	00	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja				772.821.0 00		Pembebasan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat			772.821.0 00	0				
5	1	0	0	0	00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				7.371.000		BBM Perjalanan Dinas Koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Stakeholder			9.979.200	2.608.200				
	6	0	0			Program Penanganan Bencana	Persentase kejadian bencana yang	Kabupaten Moj	100%	110.000.0 00				100%	170.000.0 00	60.000.00 0				

							ditangan ni sesuai standa r tangga p darurat	oker to												
	6	0	0	2.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persen tase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standa r	Kab upat en Moj oker to	100%	110.000.0 00				100%	170.000.0 00	60.000.00 0				

	6	0	0	2.	00	Penyediaan Makanan	Jumlah	Kab	10.00				10.00		0				
		6	6	0	01		Orang	upat	0	90.000.00			0	150.000.0					
				1			yang	en	Oran	0			Oran	00					
							Menda	Moj	g				g						
							patkan	oker											
							Perma	to											
							kanan												
							3x1												
							Hari												
							Dalam												
							Masa												
							Tangga												
							p												
							Darura												
							t												
							(Pengu												
							ngsian)												
							Kewen												
							angan												
							Kabup												
							aten /												
							Kota												
						Rincian :													
5	1	2	1	1	00	Photo copy 669 x 400				267.600				267.600	0				
					26														

5	1	2	1	1	00 43	Penisian Tabung Lpg 12 Kg 60 Tabung x Rp. 294.200,-			17.652.00 0				17.652.00 0	0				
						Beras 2.500 Kg x Rp. 19.100,-			47.750.00 0		60.000.0 00		47.750.00 0	0				
						Mie Instan 200 Dos x Rp. 181.650,-			36.330.00 0				36.330.00 0	0				
						Minyak Goreng 240 pcs x Rp. 56 400,-			13.536.00 0				13.536.00 0	0				
						Telur 60 Kg x Rp. 36.150,-			2.169.000				2.169.000	0				
						Daging Ayam 70 Kg x Rp. 50.100			3.507.000				3.507.000	0				
						Tahu 2000 Biji x Rp. 4.800,-			9.600.000				9.600.000	0				
						Tempe 600 Papan x Rp. 8.350,-			5.010.000				5.010.000	0				
						Kecap 240 Botol x Rp.26.550			6.372.000				6.372.000	0				

						Bawang Putih 24 Kg x Rp. 45.300,-				1.087.200					1.087.200	0				
						Bawang Merah 60 x Rp. 53.650				3.219.000					3.219.000	0				
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor-Dalam Kota 35 orang X Rp. 100.000,-				3.500.000					3.500.000	0				
						Pembulatan				200					200	0				
	6	0	0	2.	00	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggapan Darura	Kabupaten Mojokerto	10.000 Orang	10.000.000				10.000 Orang	10.000.000	-				

							t (Pengu ngsian) dan Pasca Bencan a Kewen angan Kabup aten / Kota													
5	1	2	1	1	00 32	Selimut 50 Buah x Rp. 160.000,-				8.000.000					8.000.000	0				
						Tisu Basah 60 Pack x Rp. 20.000				1.200.000					1.200.000	0				
5	1	2	4	1	00 03	Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota half day- fullday 8 Orang x Rp. 100.000,-				800.000					800.000	0				
6	0 6	0 6	2. 0 1	0 0 5		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencan a yang Menda patkan	Kab upat en Moj	10.00 0 Oran g	10.000.00 0				10.00 0 Oran g	10.000.00 0	-				

	6	0	0			Program Penanganan Bencana	Persen tase Potensi dan Sumbe r Keseja htraa n Sosial aktif	Kab upat en Moj oker to	100%	13.141.60 0				100%	28.091.70 0	14.950.10 0					
	6	0	0	2. 0 1		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persen tase Potensi dan Sumbe r Keseja htraa n Sosial yang menda patkan sertifik at	Kab upat en Moj oker to	100%	13.141.60 0				100%	28.091.70 0	14.950.10 0					

	6	0	0	2.	00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Mojokerto	50 Orang	13.141.600				50 Orang	28.091.700	-						
						Rincian :																
5	1	0	0	0	00	Benner 8 M2 x Rp.52.350				418.800					418.800	0						
						Foto Copy 1162 Lembar x Rp. 450				522.900					522.900	0						

5	1	0	0	0	00	Konsumsi (Kudapan/ Snack) 200 Kotak x Rp. 20.000				4.000.000					4.000.000	0				
						Konsumsi (Makan) 200 Kotak x Rp. 30.000				6.000.000					6.000.000	0				
5	1	0	0	0	00	Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon II.b 2 Orang x Rp. 400.000				800.000					800.000	0				
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon III/Pengawas pemerintahan Madya 6 Orang x Rp. 375.000				2.250.000					2.250.000	0				
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda 8 Orang x Rp. 350.000				2.800.000					2.800.000	0				
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil 16 Orang x Rp. 250.000				4.000.000					4.000.000	0				

5	1	0	0	0	00	Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota half day- fullday 27 Orang x Rp. 100.000,-			2.700.000				2.700.000	0					
						Bantuan Transport Peserta Kegiatan 46 Orang x Rp. 100.000			4.600.000				4.600.000	0					
5	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Kab upat en Moj oker to	100%	15.000.00 0			100%	15.000.00 0	-				
5	1	0	0	2.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Kab upat en Moj oker to	100%	15.000.00 0			100%	15.000.00 0	-				
5	1	0	0	'2	00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Kab upat en Moj oker to	6	15.000.00 0	DA U		Subke giatan ini mend ukung :	6	15.000.00 0	143.991.2 00			

						Rincian :						(Lihat							
5	1	0	0	0	00	Belanja Bahan-Bahan				3.800.500		Alat	Sheet		3.800.500	0			
		2	1	0	00	Bangunan dan Konstruksi						banguna	LABEL						
				1	1							n untuk	TAG						
												perawat	SUBK						
												an	EGIAT						
												makam	AN)						
												mantan	1.						
												bupati	PUD.						
												mojoker	2.6						
												to	Progr						
													am						
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk				4.300		Pembul	gerak		4.300	0			
		2	1	0	02	Kegiatan Kantor-Alat Tulis						atan	an						
				1	4	Kantor							perce						
													patan						
5	1	0	0	0	00	Belanja Alat/Bahan untuk				1.995.200		Alat	penur		1.995.200	0			
		2	1	0	03	Kegiatan Kantor-Perabot						kebersih	unan						
				1	0	KantorBelanja Alat/Bahan						an	stunti						
						untuk Kegiatan Kantor-						untuk	ng						
						Perabot Kantor						perawat	(GERC						
												an	EP						
												makam	STUN						
												mantan	TING)						
												bupati	==>						
												mojoker	Subke						
												to	giatan						

5	1	0	0	0	00	Belanja Jasa Tenaga				6.200.000,	jasa	Penyu	6.200.000	0,00				
		2	2	0	06	Kebersihan				00	tenaga	sunan	,00					
				1	2						kebersih	Dokre						
											an	n OPD						
											untuk	tertag						
											perawat	ging						
											an	Penan						
											makam	ganan						
											mantan	Stunti						
											bupati	ng						
											mojoker	pada						
											to	SIPD						
												RI						
												(Apab						
												ila						
												tidak						
												ada,						
												koson						
												gkan.						
												Karen						
												a						
												tidak						
												semu						
												a						
												subke						
												giatan						
												mend						
												ukung						

												secara langsung PUD dan PSN)									
5	1	0 2	0 4	0 0 1	00 00 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				3.000.000		Monev perawatan makam mantan bupati mojokerto			3.000.000	0,00	Merubah Volume SPPD dalam daerah karena berubah spesifikasi (160rb untuk 8jam). Dari 70 orang/pe rhari jadi 43 orang/pe rhari				
TOTAL ANGGARAN										12.742.73 7.275					12.886.72 8.475	143.991.2 00					

BAB IV

PENUTUP

3.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Renja

Penyusunan Rencana Kerja P-APBD Tahun 2026 ini merupakan penjabaran / pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi yang diaplikasikan kedalam rencana kegiatan Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2030, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2030 dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam penyusunan Rencana Kerja P-APBD Tahun 2026 :

- a. Perlu adanya perhatian lebih untuk SPM dalam penyusunan Sub. Kegiatan (khususnya SPM) untuk tahun anggaran berikutnya;
- b. Adanya pergeseran dan penambahan anggaran untuk Sub. Kegiatan yang mana di APBD Tahun 2026 tidak teranggarkan;
- c. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang penambahan (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) DBHCHT, sesuai dengan Data Proyeksi DBHCHT Tahun Anggaran 2026;
- d. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang Sekolah Rakyat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Untuk itu kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan sehingga dimasa depan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ini dapat memberikan manfaat bagi public atau masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan mandat kepada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Rencana Kerja P-APBD Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

3.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja P-APBD Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Di dalam Penyusunan Rencana Kerja P-APBD Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perubahan Rencana Kerja P-APBD Dinas Sosial Tahun 2026 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja P-APBD Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan / mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

3.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Di dalam Penyusunan Rencana Kerja P-APBD Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah.
2. Penyusunan Rencana Kerja P-APBD Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sudah sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Kerja P-APBD Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2026 yang akan datang.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja P-APBD Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto



Try Raharjo Murdianto, S.STP., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP. 19870519 200602 1 002